

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif

Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan nama Kota Solo merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15'' dan 110° 45' 35'' Bujur Timur serta antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan. Secara administratif, Kota Surakarta berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali. Wilayah administrasi Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres dan Kecamatan Banjarsari dengan masing-masing luas wilayah seperti tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Surakarta

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1.	Laweyan	8,64	19,62
2.	Serengan	3,19	7,24
3.	Pasar Kliwon	4,82	10,95
4.	Jebres	12,58	28,56
5.	Banjarsari	14,81	33,63
	Kota Surakarta	44,06	

Sumber: Badan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2018

Kecamatan di Kota Surakarta terbagi ke dalam beberapa kelurahan dan RT RW.

Berikut data lengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Laweyan	11	105	457
2.	Serengan	7	72	282
3.	Pasar Kliwon	9	100	423
4.	Jebres	11	153	649
5.	Banjarsari	13	176	885

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Surakarta Tahun 2017

Setiap kecamatan di Kota Surakarta memiliki ibu kota kecamatan masing-masing.

Kota Surakarta dengan luas wilayah 44,06 km² membuat setiap wilayah administratif kecamatan memiliki jarak yang berdekatan dengan pusat pemerintahan Kota Surakarta. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data berikut.

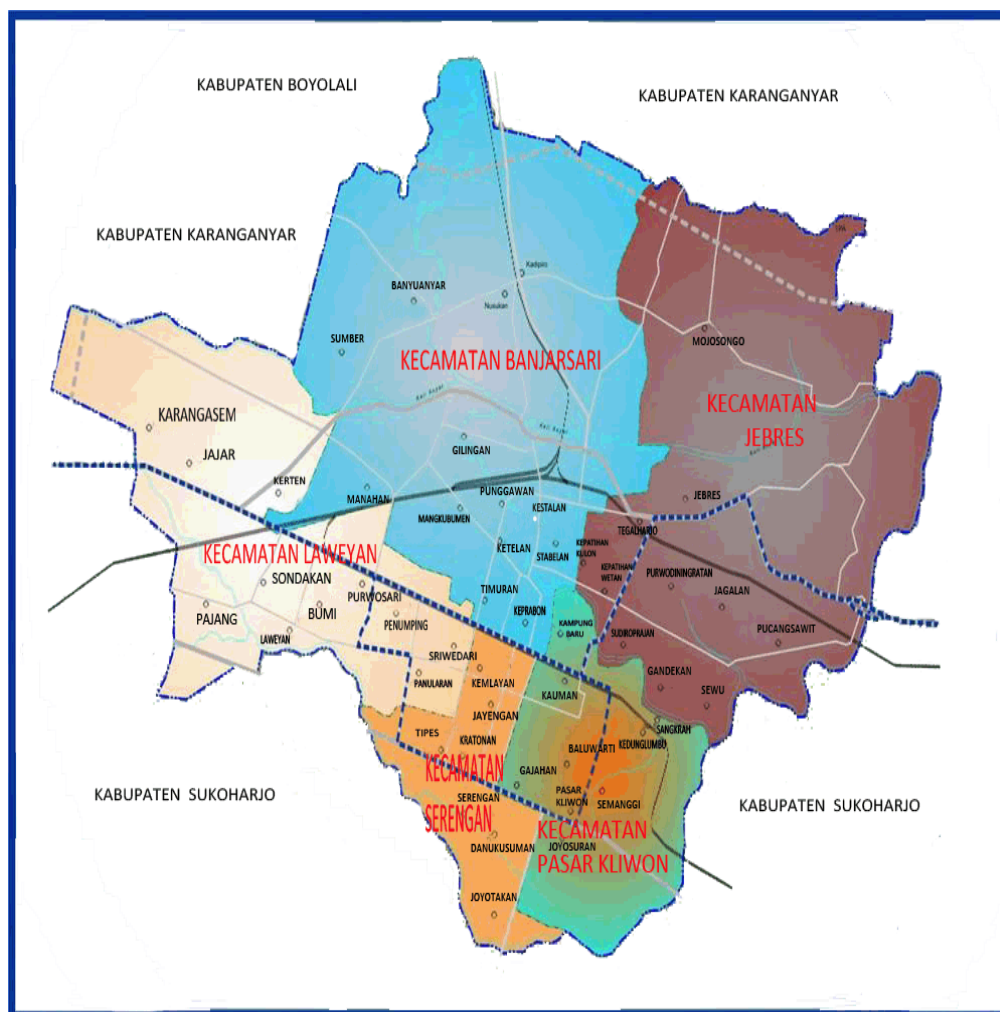
Tabel 2.3
Jarak Kantor Kecamatan ke Kantor Pemerintah Kota Surakarta

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Surakarta (km)
1.	Laweyan	Penumping	3,2
2.	Serengan	Serengan	2,8
3.	Pasar Kliwon	Joyosuran	2,2
4.	Jebres	Jebres	3,5
5.	Banjarsari	Banyuanyar	7,5

Sumber: Badan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2018

Berbagai data yang disajikan dalam tabel sebelumnya telah memberikan informasi mengenai kondisi geografis dan wilayah administratif Kota Surakarta. Secara ringkas, mengenai batas wilayah, pembagian wilayah administratif setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administratif Kota Surakarta



Sumber: Kota Surakarta dalam Angka

2. 2. Iklim

Iklim merupakan kondisi rerata cuaca yang didasarkan pada waktu yang panjang di suatu tempat. Kondisi iklim di Kota Surakarta dipengaruhi oleh letak geografis dan topografis daerah ini. Disamping itu, beberapa variabel meteorologis juga dapat diukur melalui kelembaban udara dan curah hujan. Pada tahun 2018, suhu udara di Kota Surakarta berkisar antara 22,7°C hingga 28,8°C dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 80 persen. Data tersebut dijelaskan secara detail dan ringkas pada tabel-tabel penjelasan iklim berikut.

Tabel 2.4
Kelembaban Udara dan Rata-rata Suhu Udara Menurut Bulan di Kota Surakarta Tahun 2018

No.	Bulan	Kelembaban Udara (%)	Suhu udara (°C)	
			Maksimal	Minimal
1.	Januari	88	28,5	19,7
2.	Februari	81	26	15,1
3.	Maret	82	25,8	14
4.	April	80	26,3	17,6
5.	Mei	74	28,7	20,6
6.	Juni	76	29,2	18
7.	Juli	68	31,7	21,3
8.	Agustus	67	24,9	11,1
9.	September	65	30,3	20,5
10.	Oktober	60	25,1	14,6
11.	November	71	21,6	12,0
12.	Desember	71	31,1	21,6

Sumber: BMG Lanud Adi Sumarmo

Disamping kelembaban udara yang akan menghasilkan suhu udara maksimal dan minimal setiap bulan, variabel meteorologis juga bisa diukur melalui kuantitas curah hujan di suatu wilayah. Pada tahun 2018, curah hujan terbanyak di Kota Surakarta terjadi pada bulan Januari dan Februari. Banyaknya curah hujan di bulan Januari sebesar 13,6 Mm dan bulan Februari sebesar 19,9 Mm. Bulan Januari dan Februari menjadi bulan hujan terbanyak dengan jumlah hari hujan sebanyak 24 hari.

Tabel 2.5
Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan di Kota Surakarta
Tahun 2018

No.	Bulan	Banyak Curah Hujan (Mm)	Banyak Hari Hujan
1.	Januari	13,6	24
2.	Februari	19,9	24
3.	Maret	7,8	19
4.	April	9,8	22
5.	Mei	1	9
6.	Juni	4,4	9
7.	Juli	2,6	3
8.	Agustus	0	0
9.	September	4,7	6
10.	Oktober	3,2	12
11.	November	12,8	23
12.	Desember	5,3	16

Sumber: BMG Lanud Adi Sumarmo

2.3. Sumber Daya Manusia

2.3.1. Kependudukan

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 yang menjelaskan mengenai kependudukan di Kota Surakarta Tahun 2018 diperoleh data bahwa total penduduk di Kota Surakarta sejumlah 517.887 jiwa dimana jumlah laki-laki sebanyak 251.772 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 266.115 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 94,61 dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11.759.

Tabel 2.6
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Tingkat Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (ribu)			Rasio Jenis Kelamin	Tingkat Kepadatan
		Laki-laki	Perempuan	Total		
Laweyan	8,64	43.296	45.958	89.254	94,20	10.332,00
Serengan	3,19	21.848	23.427	45.275	93,25	14.175,02
Pasar Kliwon	4,82	37.994	39.033	77.027	97,33	15.996,64
Jebres	12,58	69.167	72.013	143.180	96,04	11.379,93
Banjarsari	14,81	79.467	83.684	163.151	94,96	11.015,53
Kota Surakarta	44,06	251.772	266.115	517.887	94,61	11.759,31

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 yang telah diolah.

2.3.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan menjadi sarana untuk mempelajari ilmu pengetahuan sekaligus sebagai pengembangan karakter individu. Upaya meningkatkan pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan berupa peningkatan sarana dan prasarana penunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana ditunjang berdasarkan ketersediaan sekolah ruang kelas dan guru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Data peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Kota Surakarta disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.7
Banyak Sekolah, Ruang Kelas, Guru di Kota Surakarta Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Tahun	Sekolah	Ruang Kelas	Guru
SD	2018	247	2.337	3.409
	2017	248	2.204	3.939
	2016	250	2.034	3.965
SMP	2018	247	2.337	3.409
	2017	75	1.107	2.261
	2016	75	1.109	2.285
SMA	2018	35	610	1.725
	2017	36	648	1.332
	2016	34	634	1.376

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang telah diolah.

Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat diketahui berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan. Terdapat penurunan jumlah penduduk yang tidak memiliki ijazah SD dan pada jenjang pendidikan SMP. Sedangkan untuk jenjang pendidikan lainnya mengalami peningkatan pada tahun 2018. Meskipun jumlah penduduk dengan jenjang pendidikan SMA masih mendominasi, jumlah penduduk dengan taraf pendidikan diploma, sarjana, pascasarjana dan doktoral turut mengalami peningkatan di tahun ini.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Surakarta Tahun 2017 dan Tahun 2018

Pendidikan Tertinggi	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
Tidak Memiliki Ijazah SD	2018	37.080	50.691	87.771
	2017	41.361	49.360	90.721
SD/Sederajat	2018	38.720	40.864	79.584
	2017	37.154	47.275	84.429
SMP/ Sederajat	2018	38.469	38.426	76.895
	2017	43.115	48.281	91.396
SMA/Sederajat	2018	82.916	82.129	165.045
	2017	79.860	74.164	154.024
D I/II	2018	2.857	2.487	5.344
	2017	1.474	1.589	3.063
D III/ Sarjana Muda	2018	10.248	10.726	20.974
	2017	9.153	9.959	19.112
D IV/S1	2018	20.357	21.545	41.902
	2017	18.583	15.026	33.609
S2/S3	2018	3.054	1.806	4.860
	2017	1.985	2.112	4.097

Sumber: BPS Kota Surakarta yang telah diolah.

2. 4. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk bekerja di Kota Surakarta pada tahun 2018 mencapai 259.465 atau sebesar 50,1% dari seluruh penduduk Kota Surakarta. Penduduk pria yang bekerja mencapai 142.100 jiwa atau sebesar 54,76. Sedangkan penduduk wanita yang bekerja mencapai angka sebesar 117.365 jiwa atau sebesar 45,34% dari penduduk yang bekerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Surakarta cukup tinggi. Menurut lapangan pekerjaan utama berdasarkan jenis kelamin, mayoritas bekerja di sektor dimana jumlah perempuan yang bekerja di sektor tersebut lebih banyak dibanding jumlah laki-laki.

Tabel 2.9
Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2018

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pertanian	1.736	262	1.998
2.	Pertambangan	470	0	470
3.	Industri	30.764	26.696	57.460
4.	Listrik dan Gas	1.374	512	1.886
5.	Konstruksi	8.866	558	9.424
6.	Perdagangan	50.091	54.786	104.877
7.	Angkutan	15.353	2.787	18.140
8.	Keuangan	9.677	5.463	15.140
9.	Jasa	23.499	26.571	50.070
	Total	141.830	117.635	259.465

Sumber: Kota Surakarta dalam Angka Tahun 2018

2. 5. Budaya

Kota Surakarta dikenal sebagai kota budaya dimana adat, tradisi serta budaya Jawa masih mengakar pada kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Riwayat Kota Surakarta berkaitan erat dengan keberadaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai bagian dari sejarah Kesultanan Mataram. Sebagai kota tempat keberadaan keraton Jawa tertua, Kota Surakarta memiliki kekayaan budaya yang adiluhung. Kekayaan budaya tersebut tidak hanya berwujud benda, tetapi juga adat dan tradisi masyarakat Kota Surakarta. Kebudayaan berwujud benda dapat dilihat dari banyaknya situs cagar budaya yang dimiliki Kota Surakarta seperti Kawasan Kasunanan Surakarta, Kawasan Puro Mangkunegaran, Ndalem Wiriyodiningratan, Pasar Gedhe Hardjonagoro, Benteng Vastenburg, Stasiun Balapan, Loji Gandrung, Masjid Agung, Tugu Lilin, Monumen Sriwedari, Ndalem Joyokusuman, Ponten Mangkunegaran VII Kestalan dan sebagainya. Selanjutnya, beberapa contoh adat dan tradisi di Kota Surakarta yaitu Sekaten, Grebeg Sudiro, Sadranan, Kirab Satu Suro, Tari Bedhaya Ketawang dan lain-lain. Budaya seakan sudah hidup berdampingan dengan peradaban di Kota Surakarta.

Surakarta sebagai kota budaya tercermin dari kehidupan kota ini. Pemerintah Kota Surakarta menjadikan budaya dalam visinya dengan tujuan agar dapat mempertahankan, memelihara dan mengembangkan budaya, adat dan tradisi yang ada. Kota Surakarta telah menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara seni bertaraf internasional seperti Solo International Performing Arts dan International Mask Festival. Kota Surakarta mendapat penghargaan dari Badan Ekonomi Kreatif sebagai Kota Kreatif Bidang Seni Pertunjukan Tahun 2019.

2. 6. Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta ditunjukkan melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didominasi oleh bermacam sektor. Pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta secara makro perkeonomian pada tahun 2015 tumbuh sebesar 5,89%. Selanjutnya, pada tahun 2016 terjadi peningkatan kemampuan sumber daya ekonomi Kota Surakarta. Nilai PDRB Kota Surakarta atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan. PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 5,32%, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 8,03%. Sumbangan terbesar laju pertumbuhan PDRB Kota Surakarta menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan berasal dari sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 8,32% dan sektor Jasa Perusahaan sebesar 8,32%. Sedangkan sumbangan terbesar kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku berasal dari sektor Konstruksi yaitu sebesar 26,97%. Pada tahun 2017, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 8,65% dimana sumbangan terbesar kenaikan tersebut berasal dari sektor transportasi pergudangan sebesar 13,3%. PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 5,32% dengan sektor informasi dan komunikasi menjadi penyumbang terbesar kenaikan yaitu sebesar 8,94%. Pada tahun 2018 PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 7,62% dan mencapai 44,428 triliun rupiah. Kenaikan ini disumbang oleh kontribusi setiap sektor terhadap total PDRB Kota Surakarta. Sektor Konstruksi masih menjadi penyumbang terbesar kenaikan yaitu sebesar 27,14%.

Perekonomian Kota Surakarta menunjukkan perbaikan dengan adanya berbagai peningkatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta selama lebih dari lima tahun (2011-2017) mengalami peningkatan. Peningkatan PAD terbesar terjadi pada tahun anggaran 2017 dimana mampu mencapai realisasi PAD sebesar 527.538.846.221,91 dari target 492.503.909.101. Pertumbuhan PAD dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
Tahun 2011-2017

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
2011	176.176.060.000	181.096.816.152	1,028
2012	192.902.940.603	231.672.100.429	1,201
2013	280.169.557.000	298.400.846.632	1,065
2014	318.814.097.999	335.660.206.640,82	1,053
2015	361.019.672.000	372.798.426.790	1,033
2016	372.579.581.000	425.502.779.064	1,142
2017	492.503.909.101	527.538.846.221,91	7

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta

Peningkatan PAD yang cukup signifikan merupakan hal penting bagi pengelolaan keuangan daerah. Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal mampu berpengaruh terhadap kemandirian daerah dalam aspek ekonomi.

2.7. Pemerintahan

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pertama diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kota Surakarta memiliki Walikota melalui pemilihan secara langsung pada tahun 2004 dimenangkan oleh Joko Widodo dan F.X. Hadi Rudyatmo (partai pengusung PDI-P) yang menjabat selama periode 2005-2010 dan kembali memenangkan periode selanjutnya. Pada 2012 Joko Widodo memutuskan untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta sehingga jabatan Walikota Surakarta digantikan oleh F.X. Hadi Rudyatmo bersama Achmad Purnomo sebagai Wakil Walikota. Pada Pemilihan Walikota Surakarta tahun 2015 kembali memenangkan pasangan petahana untuk periode 2016-2020.

Kekuatan suara yang diperoleh PDI-P tidak hanya memenangkan Walikota dan Wakil Walikota yang diusungnya tetapi juga mendapatkan perolehan kursi terbanyak di Pemilihan Legislatif DPRD Kota Surakarta. Fraksi PDI-P memperoleh 23 kursi sedangkan Fraksi Golkar, PAN, PKS, Demokrat, Gerindra masing-masing mendapatkan 3 kursi. Perolehan kursi paling sedikit diperoleh oleh Fraksi PPP dan Hanura masing-masing 1 kursi.

Dari sisi birokrasi, jumlah PNS di Kota Surakarta pada tahun 2018 sebanyak 6.251 pegawai dengan 2.949 pegawai laki-laki dan 3.302 pegawai perempuan. Kualitas sumber daya birokrasi di Pemerintah Kota Surakarta ditunjukkan melalui sistem rekrutmen yang baik serta tingkat pendidikan PNS. Tingkat pendidikan PNS di Pemerintah Kota Surakarta didominasi pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana/Doktor/Ph.D sebesar 68%.

2. 8. Visi Misi

Walikota dan Wakil Walikota Surakarta memiliki visi yaitu “Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Visi tersebut mengandung makna tersendiri. Pertama, Surakarta sebagai kota budaya bermakna bahwa pengembangan yang dilakukan di Kota Surakarta berwawasan budaya dimana seluruh kegiatan dalam komponen masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Masyarakat merupakan dimensi utama dalam menciptakan harmoni sosial. Kota budaya juga bermakna sebagai upaya mempertahankan dan mengembangkan seni dan budaya. Kedua, Surakarta sebagai kota mandiri bermakna bahwa daerah mampu untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pembangunan ekonomi, menguatkan kekuatan inovatif pemerintah daerah, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, Kota Surakarta sebagai kota maju bermakna bahwa masyarakat di Kota Surakarta memiliki ciri-ciri keunggulan. Keunggulan tersebut dapat ditinjau melalui beberapa indikator seperti aspek sosial dan kependudukan, aspek kemajuan ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakkan hukum yang adil dan inklusif. Kelima, Surakarta sebagai kota sejahtera secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir bermakna terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan lapangan kerja. Sedangkan sejahtera secara batin mengandung arti adanya ketentraman, keamanan dan kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan masing-masing.

Misi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan” dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat.

2. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas berkualitas, berdaya saing, mandiri dan berkarakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikann warisan budaya daerah.

3. Wareg

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

4. Mapan

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan dan kependudukan) serta tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani.

5. Papan

Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan serta berwawasan kependudukan, lingkungan dan budaya.

2. 9. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta

Reformasi birokrasi Pemerintah Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 26-A Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019-2021. Reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan sasaran reformasi birokrasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, antara lain:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Penerapan sistem akuntabilitas dalam birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi sehingga mampu bertanggung jawab atas berbagai sumber yang diberikan kepadanya. Akuntabilitas memuat unsur integritas, pengawasan dan pelaporan. Dalam hal pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola birokrasi di Pemerintah Kota Surakarta. Pertama, Pemerintah Kota Surakarta perlu meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui peningkatan perencanaan setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua, Pemerintah Kota Surakarta perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal tersebut perlu dilakukan mengingat perlunya prioritas pengendalian zona integritas sehingga pengisian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) dapat transparan dan akuntabel. Ketiga, perlu peningkatan prestasi kinerja mengingat Pemerintah Kota Surakarta masih mendapatkan predikat “B” atau 60,77 dalam penilaian akuntabilitas kinerja.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Birokrasi mengalami permasalahan prosedur yang berbelit karena struktur yang panjang melalui banyak hierarki. Perlu dilakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui perubahan pada sistem kelembagaan sehingga mampu mendorong budaya birokrasi yang kondusif.

Pemerintah Kota Surakarta telah mencapai beberapa sasaran untuk komponen kedua ini. Pertama, berdasarkan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Rata-rata Nasional telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan penerbitan Peraturan Walikota Surakarta tentang Budaya Kerja. Kedua, berdasarkan indikator Indeks Profesionalitas ASN telah dilakukan beberapa capaian sasaran yaitu proses penetapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, pelaksanaan rekrutmen lelang Jabatan Pratama Tinggi (JPT), pelaksanaan *talent pool*, pembentukan agen perubahan serta penggunaan CAT dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ketiga, berdasarkan Indeks *e-government* Nasional telah dilakukan proses penerapan *e-planning*, *e-budgeting*, *e-kinerja*, *e-office* dan SIMARDI. Sedangkan pencapaian terakhir adalah perangkat daerah yang sesuai ketentuan regulasi dan efektif. Selain itu, pencapaian yang telah diraih Pemerintah Kota Surakarta untuk sasaran reformasi birokrasi yang efektif dan efisien pun perlu mengembangkan beberapa hal agar terjadi perubahan signifikan dalam birokrasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu evaluasi beban kerja organisasi dan tugas fungsi aparatur, optimalisasi profesionalitas aparatur dan peningkatan penerapan *e-government*.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

Dalam reformasi birokrasi, konsep pelayanan publik merupakan pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan serta harapan bagi masyarakat dan dunia usaha. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan terdapat pada dua fokus utama yaitu pelayanan sektor-sektor strategis dan *quick wins* atau fokus perubahan yang cepat. Dalam sasaran birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas terdapat beberapa indikator sebagai tolak ukur pencapaian. Pertama, indikator berupa nilai kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik. Beberapa pencapaian yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Surakarta antara lain:

1. Perangkat Daerah pelayanan publik dalam zona hijau yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sistem pelayanan publik melalui elektronik seperti “SI PINTAR” BESUK KIAMAT, SWEET SEVENTEEN, E-KELURAHAN, TAPE PASAR, SI BAPAK ON dan sebagainya.
3. SIAK yang dilaksanakan secara terintegrasi.

Kedua, indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan pencapaian SKM baik di Organisasi Perangkat Daerah Pelayanan serta Standar Operasional Prosedur di seluruh Perangkat Daerah. Ketiga, indikator layanan aduan masyarakat dengan pencapaian penerapan dan pengembangan sistem ULAS. Pencapaian yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Surakarta perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik lainnya.

2. 10. *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta

E-Budgeting di Pemerintah Kota Surakarta diterapkan melalui sistem pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP berupa aplikasi SIMDA Keuangan. Program aplikasi ini digunakan untuk mengelola keuangan daerah secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Penganggaran

Tahap penganggaran menghasilkan output seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sebagainya.

2. Penatausahaan

Tahap penatausahaan menghasilkan output Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

3. Akuntansi dan Pelaporan

Tahap akuntansi dan pelaporan sekaligus mencakup pertanggungjawaban menghasilkan output Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

Disamping itu, Pemerintah Kota Surakarta menerapkan layanan website transparansi penganggaran. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik mengenai keuangan daerah. Beberapa website transparansi penganggaran tersebut antara lain:

1. e-budget.surakarta.go.id
2. apbd.surakarta.go.id
3. Laporan Keuangan dalam ppid.surakarta.go.id.

Pemerintah Kota Surakarta hingga saat ini masih dalam proses penerapan *E-Budgeting*. Sedangkan peraturan mengenai *E-Budgeting* menjadi salah satu sasaran perubahan dalam reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26-A Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019-2021, salah satu aspek yang perlu ditingkatkan dalam *E-Government* adalah penerapan *E-Budgeting*. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan perlunya pengembangan Peraturan Walikota atau Petunjuk Teknis penerapan *E-Budgeting* sebagai tindak lanjut identifikasi permasalahan di area perubahan birokrasi yang efektif dan efisien dalam aspek tata laksana, pengawasan, akuntabilitas dan peraturan perundang-undangan.